



BADAN POM RI
BBPOM DI MAKASSAR

LAPORAN KINERJA INTERIM BBPOM DI MAKASSAR TRIWULAN I TAHUN 2021



Rencana Kerja dan Anggaran
Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran
Evaluasi Internal

Redesai Sistem Perencanaan
dan penganggaran





DAFTAR ISI



Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Grafik
Daftar Gambar
Sambutan Menteri Keuangan
Ringkasan Eksekutif

I

Pendahuluan

Latar Belakang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Isu Strategis
Arah Kebijakan
Aspek strategi Organisasi

II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahun
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Kriteria Pencapaian Indikator

III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja

Realisasi Anggaran

Analisa Efisiensi Kegiatan

IV

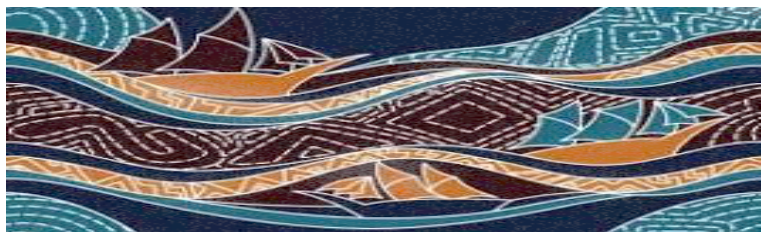
Penutup

Kesimpulan

Saran

Lampiran:

Galeri Foto Kegiatan 2021







Ringkasan Eksekutif





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar. Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama triwulan I tahun 2021. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan triwulan keempat Tahun 2020 yang merupakan kegiatan pertama setelah berakhirnya Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2015 – 2019. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2024, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di triwulan berjalan dan secara umum untuk tahun mendatang.

Kami berupaya menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim ini secara runut untuk periode triwulan I Tahun 2021 dimana sejumlah capaian kinerja pertriwulan dalam dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar dituangkan dalam laporan ini, yang merupakan gambaran capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2021 sesuai Rencana Strategis 5 (Lima) tahunan, serta perjanjian Kinerja tahunan.

Kami berharap Laporan Kinerja Interim triwulan I Tahun 2020 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Makassar, 20 April 2021

K E P A L A,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hardaningsih', written over a light blue rectangular stamp.

Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM









Bab I

Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Aspek Strategis
- d. Isu Strategis

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2021 TW I juga merupakan awal tahun kedua masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 yang memiliki visi Presiden “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian bertandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020- 2024.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 7 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember 2020 setelah DIPA diserahkan sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021," pesan Presiden Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar pemerintah bekerja lebih cepat karena dalam kondisi krisis, semangat harus berbeda menjadi extraordinary agar program stimulus berdampak dan berdaya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. "Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi nasional dan daerah sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021, Sesuai arahan Presiden dengan memanfaatkan APBN secara cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, Presiden juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk memecahkan masalah dan membantu rakyat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, sebagai bagian integral pelaksanaan APBN.

Sesuai dengan arahan presiden tersebut, Badan POM memastikan DIPA Badan POM sangat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional, dan Badan POM akan terus mengawal implementasinya, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Maju.

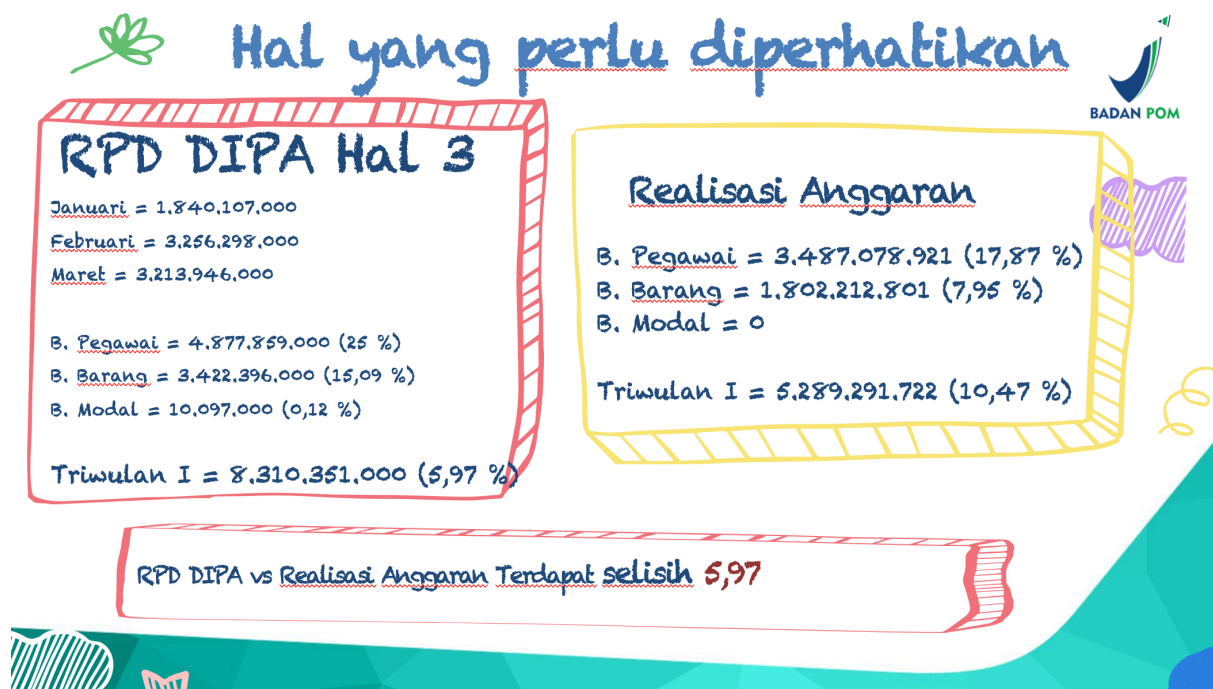
Pada TA 2021, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM.. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga triwulan ke IV kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan APBN 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi kegentingan, seperti dampak sosial, dampak ekonomi yang besar dan risiko gangguan stabilitas pada sistem keuangan, sehingga diperlukan langkah cepat dan antisipatif.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Interim di Balai Besar POM Makassar Triwulan I Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Makassar disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

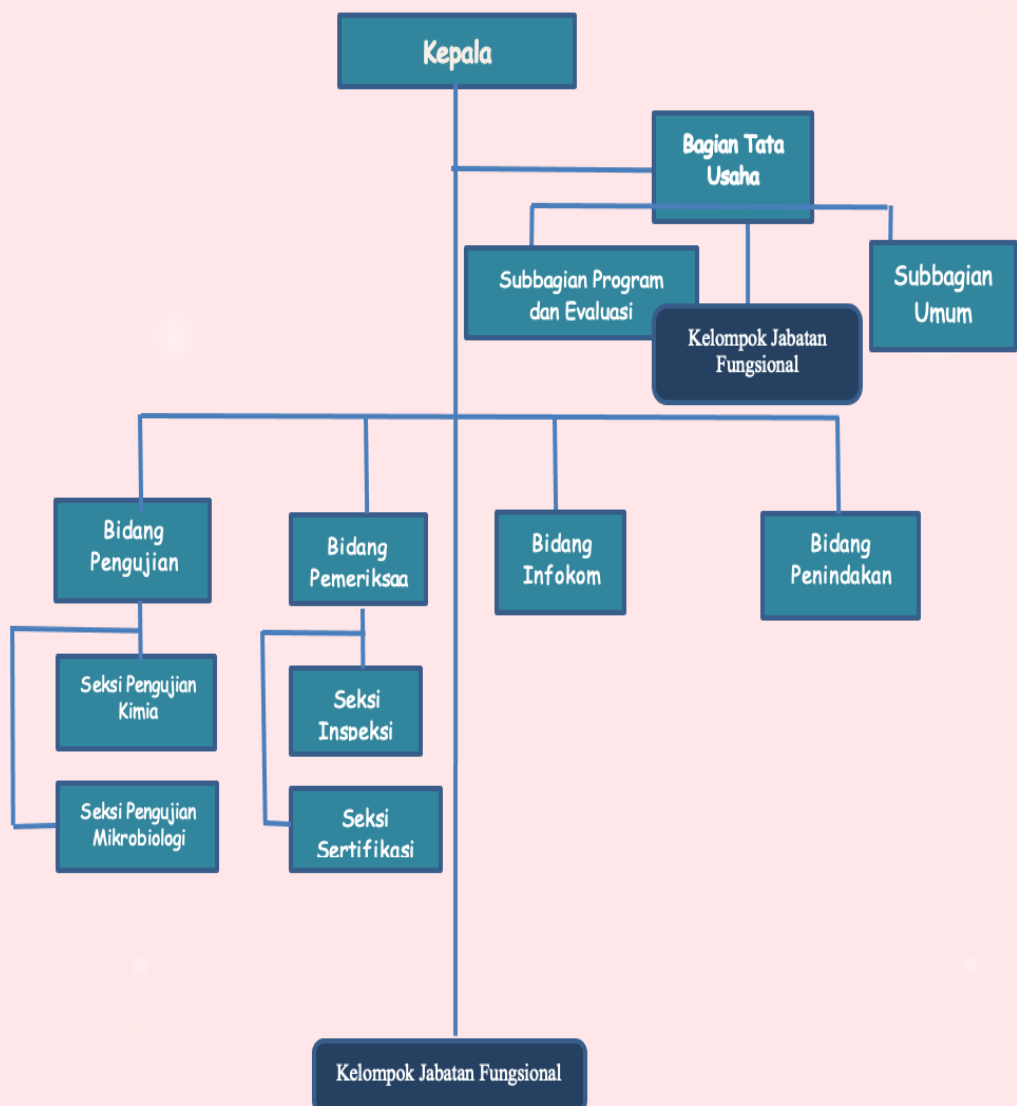
Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Makassar



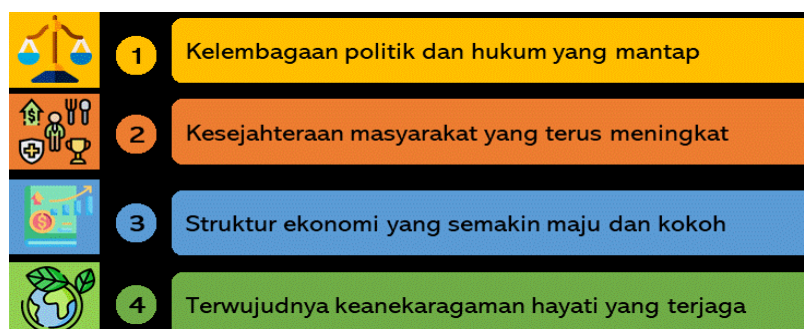
Gambar 1.1

Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.

C. Isu Strategis

Agar pengawasan Obat dan Makanan menjadi lebih tajam, terarah dan mendalam, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan secara lebih terperinci dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan untuk periode Tahun 2019 yaitu **“Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015- 2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya”**.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2024. Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah: .



Gambar 1.3 Empat Pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemertaan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Gambar 1.4 Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah **Pemenuhan Layanan Dasar**. Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper*.
- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, **serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal**.
- Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk optimalnya fungsi pengawasan dan perkuatan peran dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak dijamin mutu dan keamanannya sangat dibutuhkan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan. Adanya regulasi dapat memberikan perkuatan pada legal aspek sehingga meningkatkan “kewibawaan” pengawasan.

Sasaran, indikator, serta target BPOM dalam mendukung isu strategis ini adalah

Tabel 1.1

Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	80,8	92.3
2	Persentase makanan yang berkualitas	78	86

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

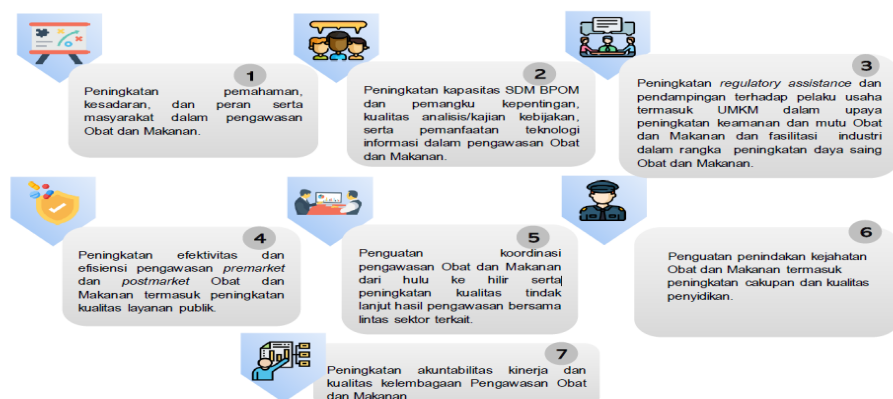
Isu “Pemenuhan Layanan Dasar” dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: **Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: **Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan**, mencakup: **pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan**.

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan Pemangku Kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sector terkait;
6. Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1.5. Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 3.4 Strategi BPOM 2020-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI MAKASSAR

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan, adapun arah kebijakan BBPOM di Makassar yang akan dilaksanakan antara lain :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM dan Pemangku Kepentingan kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKN di Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan keamanan, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Makassar melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor Pusat maupun Daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BBPOM di Makassar melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BBPOM di Makassar mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai. Pengelolaan SDM berdasarkan sistem manajemen mutu implementasi ISO 9001 : 2019 berbasis kinerja.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian terakreditasi yang mendukung kualitas pengujian obat dan makanan yang mampu telusur dengan hasil uji terjamin validitasnya. Sistem manajemen mutu Laboratorium yang handal dengan implementasi ISO 17025 : 2018 secara konsisten pada semua proses yang dilakukan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BBPOM di Makassar, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BBPOM di Makassar harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BBPOM di Makassar juga tentunya Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh BBPOM di Makassar.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- 2) Pengujian Secara Laboratorium;
- 3) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar dan Loka POM Palopo), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditujukan agar BBPOM di Makassar dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor pusat maupun daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BBPOM di Makassar dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Koordinasi pengawasan bersama pemerintah daerah dan lintas sector terkait yang berperan dalam penerapan Inpres no.3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan keamanan obat dan makanan.
- d. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan.

Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BBPOM di Makassar dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM di Makassar harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BBPOM di Makassar harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

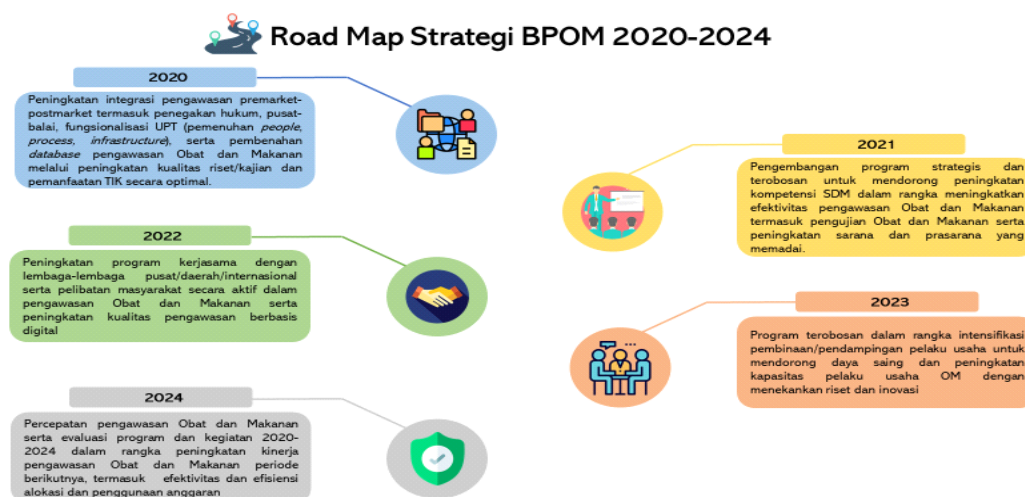
- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.7

Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024

- Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

BBPOM di Makassar dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal menggunakan analisis SWOT Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) telah memberikan pandangan bagi BBPOM di Makassar terkait permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar BBPOM di Makassar tertuang dalam tabel berikut ini:



Gambar 1.8. Hasil Analisis SWOT

ASPEK STRATEGI ORGANISASI

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per November 2020 adalah sejumlah 125 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Sedangkan jumlah SDM di Loka POM di Kota Palopo adalah sebanyak 16 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.

Tabel 1.1
Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

BBPOM DI MAKASSAR			LOKA POM DI KOTA PALOPO		
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	16	12,80 %	Non Sarjana	1	6,25 %
S1	39	31,20 %	S1	15	93,75%
Profesi	50	40 %	Profesi	6	%
• Apoteker	50	40 %	• Apoteker	6	%
• Non Apoteker		0 %	• Non Apoteker	9	0 %
S2	20	16 %	S2	1	0 %
S3	0	0%	S3	0	0%
Total	125	100 %	Total	16	100 %

*Keterangan: data SIAP per November 2019

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m² diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2020, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.047.323.000,-. Namun terdapat revisi DIPA pertama tanggal 02 Maret 2020 dalam rangka penambahan anggaran untuk kegiatan KIE sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 50.544.323.000 kemudian Pada Tanggal 30 April terbit Revisi DIPA kedua Rp. 44.216.042.000 dalam rangka refocussing penanggulangan covid 19, selanjutnya revisi anggaran revisi DIPA keempat tanggal 13 Oktober 2020 dalam rangka penambahan anggaran pada output 3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman menggunakan Pola baru sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 45.992.042.000.

EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan 1 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

Isu Strategis

Eksistensi sebuah instansi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi kinerja BBPOM di Makassar pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Visi-Misi Presiden (Pangan PJAS, Desa, Pasar)

BBPOM di Makassar berperan dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular dan penurunan angka stunting. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) yang diinisiasi Badan POM sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden No 1 tahun 2017 terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Germas SAPA dilakukan melalui kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Gerakan Pasar aman (Paman).

2. Dukungan Terhadap UMKM

Jumlah UMKM di Sulawesi Selatan mencapai 916.232 unit (Bapedda Pemprov Makassar tahun 2019). Pada tahun 2020, BBPOM di Makassar melakukan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan bimbingan teknis e-registrasi pangan olahan, dengan output antara lain menerbitkan 12 NIE pangan olahan dari UMKM pangan di BBPOM di Makassar.

3. Penegakan Hukum Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Makassar

Sebagai kota Daeng juga sebagai kota jalur perdagangan dan transit antar propinsi juga sebagai kota pelajar untuk Kawasan bagian timur Indonesia, Makassar memiliki populasi dengan latar belakang yang beragam diantaranya golongan mahasiswa dan usia produktif yang diyakini melek IT dan berpotensi menggerakkan perekonomian melalui usaha skala kecil, namun juga menunjukkan peluang dalam peningkatan resiko atas pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di Makassar

4. Pengawasan Produk Obat JKN

BBPOM di Makassar melakukan pengawasan terhadap produk obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain melalui *sampling* dan pengujian obat serta pemeriksaan sarana sesuai CPOB, CDOB dan GPP. Sampling obat JKN dilakukan sesuai Prioritas Sampling tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Sampling *purposive-targeted* obat JKN dilakukan melalui pendekatan analisis risiko produk obat yang digunakan di sarana pemerintah maupun sarana pelayanan lain yang bekerja sama dengan BPJS.

1. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Makassar sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitasi pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Makassar melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Reformasi Birokrasi (RB)

Implementasi RB oleh BBPOM di Yogyakarta menuju *good and clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas, berpedoman pada *Road Map*-RB BPOM tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, BBPOM di Makassar belum berhasil berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenpanRB

.

7. Pandemi Covid-19

Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19





Bab II

Perencanaan Kinerja

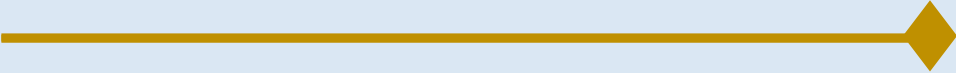
- a. Rencana Strategis 2020-2024
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- c. Kriteria Pencapaian indikator

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024. Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM.



Visi

“Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Balai Besar POM di Makassar untuk mewujudkan Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek sebagai berikut :

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

misi

1

Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Penjelasan misi :

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai

koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

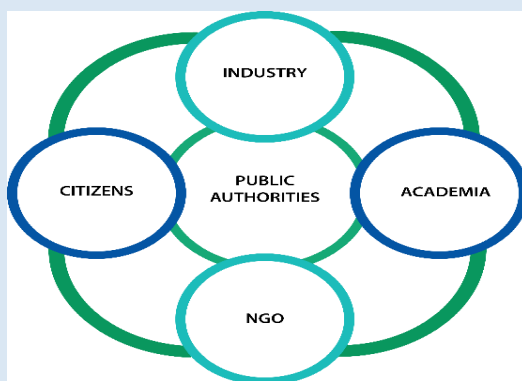
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan

cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

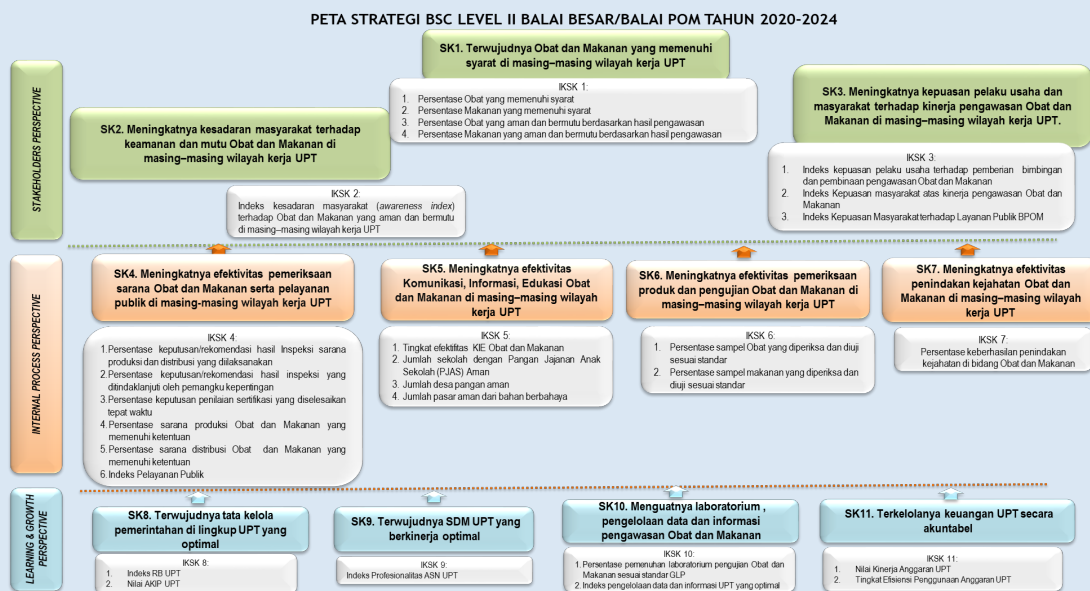
Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan kekuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing , diharapkan Balai Besar

POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Makassar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Makassar akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Kota Palopo berikut:

Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan sasaran strategis tersebut, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun sasaran kegiatan dengan pertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya termasuk infrastuktur yang dimiliki. Sasaran kegiatan yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 2015-2019 yang mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2018 yang tercantum dalam Peta Strategis BSC level 0. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi sasaran kegiatan pada peta strategis Level II BBPOM di Makassar.



Gambar 2.3 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar

Sumber: Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2020

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2020-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 BBPOM di Makassar

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator
Stakeholder	SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSS.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSS.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSS.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
	SS.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		IKSS.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		IKSS.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Internal Process	SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	
Learning and Growth	SS.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	IKSS.8.1 Indeks RB BBPOM di Makassar
		IKSS.8.2 Nilai AKIP BBPOM di Makassar
	SS.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS.9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
	SS.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		IKSS.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
	SS.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS.11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		IKSS.11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Stakeholder Perspective :

1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83,6 pada akhir tahun 2021;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 89 di tahun 2021;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 83,6 pada akhir tahun 2021;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2021.

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Makassar bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2021.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BBPOM di Makassar berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Makassar, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Makassar bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84,5 pada akhir tahun 2021;
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 72 pada akhir tahun 2021;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 90 pada akhir tahun 2021.

Internal Process Perspective:

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2021;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 60 pada akhir tahun 2021;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu , dengan target sebesar 88 pada akhir tahun 2021;
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 51 pada akhir tahun 2021;

- 5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60 pada akhir tahun 2021.
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 3,76 pada akhir tahun 2021.

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 86,87 pada akhir tahun 2021;
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 40 pada akhir tahun 2021;
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 12 pada akhir tahun 2021;
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 8 pada akhir tahun 2021.

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 86 pada akhir tahun 2021;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2021.

7. Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 73 pada akhir tahun 2020.**

Learning and Growth Perspective

8. Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2021;
- 2) Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 85 pada akhir tahun 2021.

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2021.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 79 pada akhir tahun 2021.
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal, dengan target sebesar 2 pada akhir tahun 2021.

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning*

and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 94 pada akhir tahun 2021;
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 88,5 pada akhir tahun 2021.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	89
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88,5%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 (dapat dilihat pada lampiran 2). Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	84,5

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73

	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	89
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88,5%)

Kegiatan

Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Rp 25.363.546.000

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Rp. 25.164.566.000

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2020 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	83,60	381.100.800
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	80,00	80,00	80,00	176.469.750
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	83,60	83,60	83,60	95.275.200
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	80,00	80,00	80,00	58.823.250
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	77,00	139.350.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84,50	229.649.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	72,00	105.166.000

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	-	-	90,00	577.333.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	89,00	89,00	189.543.200
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	60,00	60,00	60,00	81.232.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	88,00	88,00	88,00	228.240.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00	51,00	51,00	51,00	365.455.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	1.708.359.000
		Indeks Pelayanan Publik				3,76	99.720.000
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	86,87	86,87	86,87	3.396.344.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	40	798.340.000
		Jumlah desa pangan aman	-	-	-	12	913.058.000

		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	8	503.990.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	60	86	461.440.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	40	77	529.370.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	43	50	73	1.336.127.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	89,00	270.746.000
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	85,00	342.215.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	77,00	19.895.512.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	79,00	8.851.737.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	380.291.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	30	50	75	94	8.045.029.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88,50)	368.196.000

2.5. Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Makassar merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan Membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus di bawah.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 \% - \text{Realisasi})}{(100 \% - \text{Target})} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus di bawah.

$$\% \text{ Capaian} 100 \% = \frac{(\text{Realisasi})}{(\text{Target})} \times 100 \%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran

Kriteria penilaian Capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Tidak dapat disimpulkan	$\chi \leq 120\%$
Sangat Baik	$110\% < \chi \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$
Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$
Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$
Sangat Kurang	$< 50\%$

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSP)

Nilai Pencapaian Sasaran (NSP) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikalikan dengan bobot :

$$NPS2 = \frac{1 \text{ NPI}1 + 1 \text{ NPI}2}{2}$$

$$NPS3 = \frac{1 \text{ NPI}1 + 1 \text{ NPI}2 + 1 \text{ NPI}3}{3}$$

$$NPS4 = \frac{1 \text{ NPI}1 + 1 \text{ NPI}2 + 1 \text{ NPI}3 + 1 \text{ NPI}4}{4}$$

$$NPS5 = \frac{1 \text{ NPI}1 + 1 \text{ NPI}2 + 1 \text{ NPI}3 + 1 \text{ NPI}4 + 1 \text{ NPI}5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai hasil capaian baik faktor/analisis penyebab ketidaktercapaian kinerja triwulan yang lalu atau faktor pendukung/analisis penyebab capaian kinerja serta rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

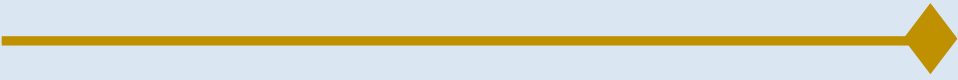
1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar. Penanggung jawab data di setiap bidang bertanggungjawab melakukan penginputan sesuai dengan form data kinerja, kertas kerja dan penginputan pada database bit.ly data kinerja secara rutin setiap bulan dan triwulanan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada bit.ly data monev berupa RAPK, RHPK, aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi memanfaatkan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) dimana aplikasi ini telah menyediakan pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 , eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Hasil pengukuran ini kemudian menjadi dasar dan diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi acuan dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Dari 28 indikator dan diantaranya ada 14 indikator untuk penilaian interim triwulan I Tahun 2021 pada 11 sasaran strategis, 13 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian $\geq 90\%$ terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator (persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya dibawah 90 %



A. Capaian IKU triwulan I Tahun 2021

Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024. Capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2021 sebesar 81,50 % yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis NPSS secara manual, meskipun perhitungan NPSS telah diterapkan di Tahun 2020, namun aplikasi kinerja yang diimplementasikan di BBPOM Makassar pada aplikasi E-Performance masih dalam proses maintenance.

Nilai NPSS triwulan I Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) triwulan I Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2020-2024 yaitu 94,63 %.

Gambar 3.1 Dashboard Peta Strategi BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
			2021		
			Realisasi		
Stakeholder Perspective					
Capaian Perspective stakeholder				109,25	109,25
Internal Process Perspective					
Capaian Internal Process Perspective				59,90	58,76
Learning & Growth Perspective					
Capaian Learning & Growth Perspective				73,64	73,64
NPS TOTAL				80,93	80,55

diperoleh nilai NPSS di triwulan I Tahun 2021 sebesar 80,55 % dengan kriteria Cukup, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 109,25 %, NPS perspektif internal proses sebesar 58,76 %, NPS perspektif *learning & growth* sebesar 73,64 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa di triwulan I BBPOM di Makassar **belum berhasil** mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2020 sebagai tahun kedua periode Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1. Capaian Kinerja

Dari 28 indikator dan diantaranya ada 14 indikator untuk penilaian interim triwulan I Tahun 2021 pada 11 sasaran strategis, 13 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian $\geq 90\%$ terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator (persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya dibawah 90 %

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Terhadap 11 sasaran strategis penilaian pada tahun 2020 terdapat 7 sasaran strategis dengan kategori baik, 1 sasaran strategis kategori sangat baik, 1 sasaran strategis kategori tidak dapat disimpulkan hingga tidak dapat disimpulkan dan belum berhasil mencapai target 2 sasaran strategis dengan kategori Cukup seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	111,07	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	116,09	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	102,78	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	106,06	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	118,42	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stakeholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 111,17 ; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 0 ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 0 ; dimana tiga sasaran strategis pada perspektif ini hanya sasaran strategis satu yang memiliki target di triwulan I Tahun 2021 berada pada kategori **Baik**.

Persepective *Internal Proses* sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tidak dapat dinilai karena target berada pada triwulan ke IV Tahun 2021. Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 116,09 Sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” dan Sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” , kategori baik dengan nilai masing-masing 102,78 dan 106,06 .

Pada *learning and growth perspective* terdapat empat sasaran strategis dan hanya satu sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel” dengan nilai 115,58 kategori **Baik** “sedangkan sasaran strategis delapan, Sembilan dan sepuluh penilaiannya pada akhir tahun 2021.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	% Capaian	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	84,21	100,73	111,07
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	90,00	112,50	
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	100,00	119,62	
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	89,16	111,45	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36	116,09
		10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	74,69	124,48	
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	87,50	99,43	
		12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	57,45	112,65	
		13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78,93	131,55	
		14 Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	
5		15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	-	-	-

	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	
		17 Jumlah desa pangan aman	-	-	-	
		18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	4,00	-	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	12,49	83,27	102,78
		20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	12,23	122,30	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	35,00	106,06	106,06
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22 Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	-
		23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
		26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2	-	-	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	30	36,96	123,20	115,58
		28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	95	107,95	

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan 4 Indikator sebagai berikut :

1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
Target 83,60 Realisasi 84,21 Capaian 100,73 %
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Target 80,00 Realisasi 90,00 Capaian 112,50 %
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Target 83,60 Realisasi 100 Capaian 119,62 %
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Target 80,00 Realisasi 89,16 Capaian 111,45 %

Pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar “ seluruh indikator nilai capaiannya diatas dari target mencapai lebih dari 100 % yaitu indikator pertama, kedua, ketiga dan keempat yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar antara lain adalah persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 84,21 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak Obat MS}}{\text{Total sampel Acak Obat yang diperiksa dan di uji}} \times 100 \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 adalah 100,73 % dengan realisasi sebesar 84,21 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

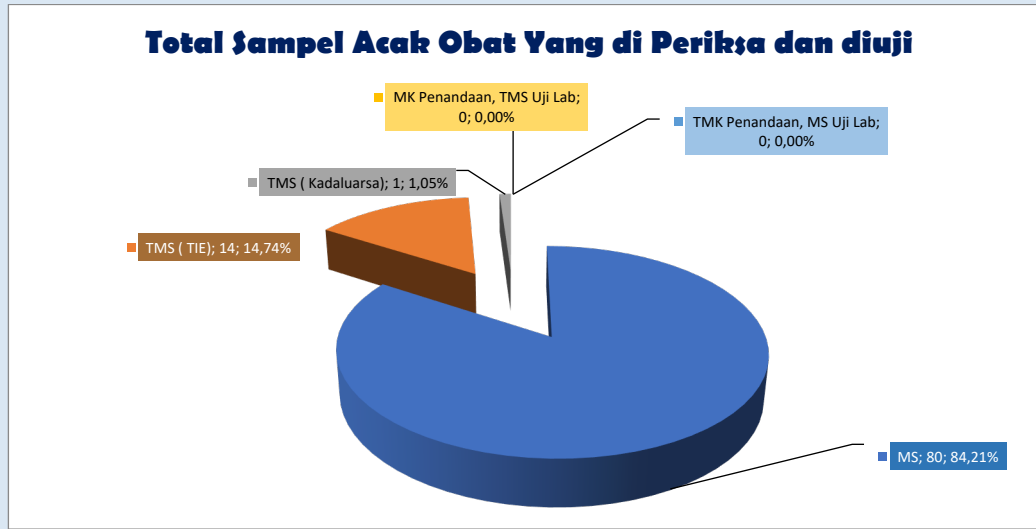
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60	84,21	100,73	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah sampel acak produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 80 sampel terhadap total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 95 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 95 sampel terdiri atas 43 sampel obat, 15 sampel Obat tradisional, 0 sampel suplemen Kesehatan dan 37 sampel kosmetik, dari 95 sampel tersebut terdapat 15 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas:

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 14 (14 kosmetik) Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 1 (1 kosmetik) Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 0 Sampel



Gambar 3.2

Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji triwulan I Tahun 2021

Jumlah sampel Obat sampai dengan triwulan I Tahun 2021 yang diperiksa adalah 185 sampel dan sebesar 95 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 90 sampel obat yang carry over di triwulan II Tahun 2021.

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021 dengan riwulan I Tahun 2020

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020.

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	80,8	88,89	110,01	Sangat Baik
Triwulan I Tahun 2021	83,60	84,21	100,73	Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM Makassar untuk triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Triwulan I Tahun 2021 berada pada angka 100,73 kategori “baik” lebih rendah apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2020 dengan nilai 110,01 kategori “Sangat Baik”

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60	92,30	84,21	91,24	Baik

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Mengikuti petunjuk dalam KepKa Badan POM tahun 2021 tentang Pedoman *Sampling* Obat & NAPZA Tahun 2021
Untuk sampling obat secara acak/random dilakukan secara acak untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk yang beredar. Sampling acak yang dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan NAPZA Tahun 2021 dengan kaidah stratified random sampling dimana cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. Tingkatan yang dimaksud adalah tingkatan kelas terapi berdasarkan jumlah produk beredar. Sampling acak diperuntukkan untuk obat JKN dan obat non JKN.
- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan I Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 84,21 %. Pelaksanaan sampling obat oleh Balai Besar POM di Makassar dilakukan secara onsite dengan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang belum berakhir.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sedangkan untuk sampel Suplemen dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar adalah 95 sampel, terdiri atas 80 sampel memenuhi syarat dan 15 sampel yang tidak memenuhi syarat, berasal dari 15 sampel acak yang TMS (14 TIE/Ilegal/Palsu komoditi kosmetik dan 1 kedaluras komoditi kosmetik).

- Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah mempengaruhi tingginya persentase obat yang tidak memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan/label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku di wilayah sampling BBPOM Makassar juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan I Tahun 2020 hal ini disebabkan karena tidak mencantumkan interaksi obat pada brosur komoditi obat; klaim yang tidak sesuai pada Obat Tradisional dan Kosmetik.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- ❖ Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan, baik secara daring maupun kunjungan ke sarana di masa Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.

- ❖ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- ❖ Metode sampling acak untuk produk Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dilakukan dalam rangka menjawab sampling representatif (keterwakilan semua risiko yang ada di masyarakat), dimana metode sampling yang dilakukan pada tahun 2021 menggunakan metode pengawasan *Multistage* sampling sebagai upaya agar jenisnya lebih bervariasi
- ❖ Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan jenisnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap jenis sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betasnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap betas sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2021, Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.



2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Makanan yang dipeiksa dan diuji

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan makanan yang memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 90,00 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS yang diperiksa}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang diperiksa dan diuji}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2021 adalah 112,50 % dengan realisasi sebesar 90 % Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

Tabel 3.8

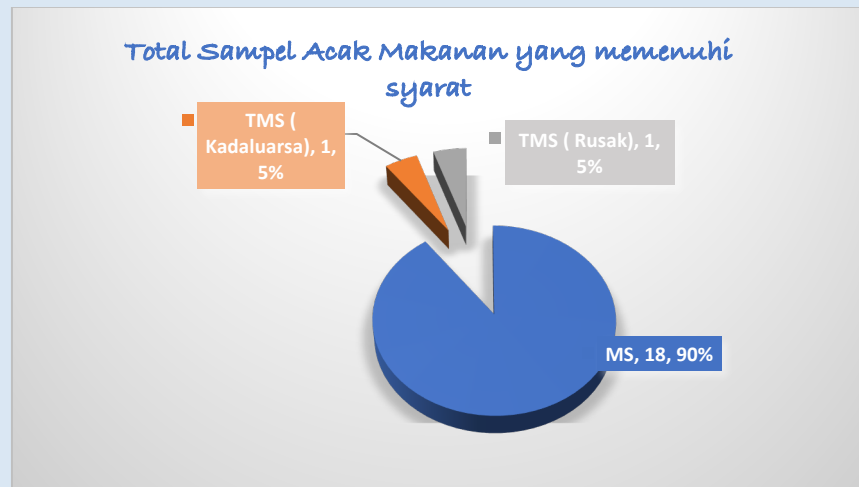
Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	90	112,50	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel acak produk Makanan MS yang diperiksa dan di uji 18 sampel terhadap total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 20 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2021. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel makanan yang diperiksa adalah 20 . Dari 20 sampel tersebut terdapat 2 sampel makanan tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 0 Sampel



Gambar 3.7

Jumlah Sampel makanan yang diperiksa dan diuji triwulan I Tahun 2021

Jumlah sampel makanan triwulan I Tahun 2021 yang diperiksa adalah 60 sampel dan sebesar 20 sampel yang selesai diperiksa dan diuji dan sisanya sebanyak 40 sampel obat yang carry over di triwulan II Tahun 2021.

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Tabel 3.9. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020.

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	78	0	0	Sangat Kurang
Triwulan I Tahun 2021	80	90	112,50	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM Makassar untuk triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Triwulan I Tahun 2021 berada pada angka 112,50 kategori “sangat baik” lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2020 dengan nilai 0 kategori “Sangat kurang”

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2024	Realisasi 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	86	90	104,65	Baik

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat triwulan I Tahun 2021 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, disertai dengan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan dan ritel, mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar.
- Terhadap sampel Makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Makanan yang sudah disetujui oleh direktorat Registrasi Pangan Olahan sebanyak 0 %
- Terhadap sampel Makanan yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium yaitu TMS pada parameter pemanis siklamat, pemanis sakarin, pewarna tartrazin, pewarna eritrosin sebanyak 0 %

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase makanan yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ *Sampling* Makanan dilakukan Balai Besar POM di Makassar sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- ❖ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.

- ❖ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- ❖ Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi pangan olahan terkait pemenuhan CPPOB.
- ❖ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- ❖ Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Makanan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Makanan yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Produk Pangan) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betasnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap betas sesuai parameter uji yang telah ditentukan. cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2020
- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.

- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n . Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS



3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada tahun triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat aman \& Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total sampel Targeted Obat diperiksa \& diuji}} \times 100 \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2021 adalah 119,62 % dengan realisasi sebesar 100 Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	100,00	119,62	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 40 sampel terhadap sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 76 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 76 sampel terdiri atas 12 sampel obat, 24 sampel Obat tradisional, 5 sampel suplemen Kesehatan dan 35 sampel kosmetik, dari 76 sampel tersebut terdapat 0 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel



Gambar 3.9

Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji triwulan I Tahun 2021

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	80,60	78,05	96,83	Baik
Triwulan I Tahun 2021	83,60	100	119,62	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar untuk triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Triwulan I Tahun 2021 berada pada angka 119,62 kategori “sangat baik” lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2020 dengan nilai 96,83 kategori “Baik”

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.14. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	92,30	100	108,34	Baik

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori sangat baik antara lain :

- Keberhasilan Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi Perka BPOM No. 25 tahun 2017 tentang Tata Cara dan *mandatory Sertifikasi* CDOB
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Jumlah sampel obat targeted di triwulan I Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar adalah 40 sampel, tidak memenuhi syarat sejumlah 0 sampel dan 40 memenuhi syarat
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang sudah disetujui oleh Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 0 %
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium sebanyak 0 %
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sampel TIE, Kedaluarsa yaitu 0 sampel

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan, baik secara daring maupun kunjungan ke sarana di masa Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan

produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

○ Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.

○ Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betisnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap betis sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2021, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel Targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak ; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets dan Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS



4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted makanan yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah sepenuhnya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 89,16 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ makanan aman \& bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted makanan diperiksa dan diuji}} \times 100 \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021 adalah 111,45 % dengan realisasi sebesar 89,16 % makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2021

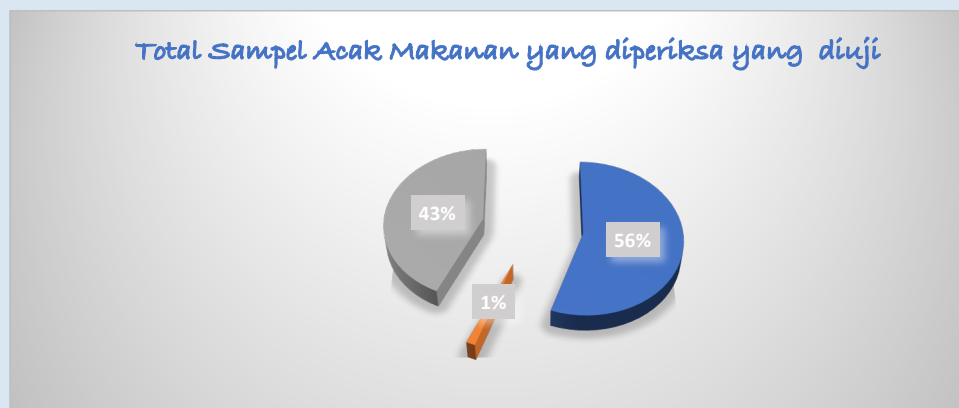
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	89,16	111,45	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk makanan MS yang diperiksa dan di uji sebanyak 168 sampel terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 217 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020, yaitu Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak aman dan bermutu adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji adalah 74 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dari 74 sampel tersebut terdapat 33 sampel makanan tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang terdiri atas :

1. Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Illegal palsu : 0 Sampel
2. Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
3. Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
4. Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
5. Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 1 Sampel

6. Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 32 Sampel



Gambar 3.11

Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji triwulan I Tahun 2021

Jumlah sampel makanan targeted sampai dengan triwulan I Tahun 2021 yang diperiksa adalah 83 sampel dan sebesar 74 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 9 sampel makanan yang carry over di triwulan II Tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.17. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	78	78,85	101,08	Baik
Triwulan I Tahun 2021	80	89,16	111,45	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar untuk triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Triwulan I Tahun 2021 berada pada angka 111,45 kategori “sangat baik” lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2020 dengan nilai 110,01 kategori “Sangat Baik”

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.18. Perbandingan realisasi Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	86	83,33	96,90	Baik

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Dengan adanya pandemi Covid-19 Sampiling Produk Pangan di triwulan kedua bulan April dan Mei tidak dilakukan. Setelah Pembatasan Berskala Besar terkait Covid 19 mulai dilonggarkan Sampling Pangan kemudian mulai dilakukan di bulan Juni sd pertengahan triwulan keempat bulan September baik melalui online maupun secara onsite.
- Jumlah sampel makanan yang diuji Tahun 2020 mencapai 100 % (217 sampel makanan) yang disampling secara targeted. hasil pengujian Makanan yang TMS sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium disampling secara purposive/targeted. Sampel yang tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 49 sampel dari total 217 sampel makanan yang diuji, dengan TMS parameter Siklamat. pada sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) serta TMS parameter KIO3 dan kadar air pada sampel fortifikasi garam beryodium. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan, khususnya dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran para guru, orang tua murid, murid dan pedagang sekitar sekolah terhadap keamanan pangan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang aman dan bermutu.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan

sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betisnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap betis sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2020, Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



Sasaran 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan Indikator :

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu



Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Variabel

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Perilaku

KLIK

Metodologi

Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *Multistage random sampling* dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan Jumlah sampel ditetapkan dengan metode *Probability Proportional to Size (PPS)*. Penetapan populasi/responden adalah

- Daftar sampel blok sensus (DSBS) tiap provinsi dilengkapi dengan informasi klasifikasi daerah (perkotaan dan perdesaan).
- Daftar sampel rumah tangga (DSRT) di blok sensus terpilih berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner

o Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 71.

Tabel 3.20

Target Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar triwulan I tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	77	-	-	-

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kajian yang bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner.

1. Indeks Kesadaran Masyarakat

Indikator pembentuk indeks Kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu :

2. Pengetahuan

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

3. Sikap

Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

4. Perilaku

Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.21

Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2021

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

Pada akhir Tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.



Sasaran 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indikator Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
 Target - Realisasi - Capaian -

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
 Target - Realisasi - Capaian -

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
 Target - Realisasi - Capaian -



1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Aspek Pengukuran

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 84,5 .

Tabel 3.25

Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2021

Indikator	Target Triwulan I 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini :

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan



Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM

Indikator Pembentuk

- ***tangibles,***
- ***realibility,***
- ***responsiveness,***
- ***assurance dan***
- ***emphaty***

Target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 72 .

Tabel 3.28

Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target triwulan I 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	73,94	107,16	Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks:

- 1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

- 2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.



3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Akuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 90 .

Tabel 3.32

Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target Triwulan I 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini Permen PAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Pada Tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Realisasi indikator ini ditargetkan akan diperoleh pada triwulan IV. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi hasilnya telah diperoleh pada triwulan IV tahun 2021.



Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan dan pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	6	Indeks Pelayanan Publik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Target 89 Realisasi 100 Capaian 112,36 %
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Target 60 Realisasi 72,67 Capaian 121,12 %
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Target 88 Realisasi 87,50 % Capaian 99,43 %
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Target 51 Realisasi 57,45 % Capaian 112,64 %
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Target 60 Realisasi 78,93 Capaian 131,55 %
Indeks Pelayanan Publik Target 3,76 Realisasi - Capaian -

Pada sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 5 indikator antara lain :



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 100 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2021 adalah 63 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan adalah 63 dengan realisasi 100 %. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 89 %

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112,36	Sangat Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2021 adalah 100 dengan kriteria sangat baik.

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindaklanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keseluruhan jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan pada triwulan I Tahun 2021 adalah 63 keputusan/rekomendasi terdiri atas 63 keputusan/rekomendasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dari 63 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan tersebut keseluruhan jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 58, Tindak lanjut = 58
 - Obat 30 keputusan/rekomendasi, 30 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 6 keputusan/rekomendasi, 6 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 9 keputusan/rekomendasi, 9 Tindak lanjut
 - Pangan; 13 keputusan/rekomendasi, 13 Tindak lanjut
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 4, Tindak lanjut = 4
 - Obat 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
 - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 0, Tindak lanjut = 0
 - ◆ Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - ◆ Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - ◆ Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - ◆ Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - ◆ Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 1, Tindak lanjut = 1
 - a. Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - b. Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - c. Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - d. Kosmetik; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
 - e. Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Tabel 3.36. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	87	49,66	57,08	Kurang
Triwulan I Tahun 2021	89	100	112,36	Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Triwulan I Tahun 2021 berada pada angka 112,36 kategori “Sangat baik” lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2020 dengan nilai 57,08 kategori “Kurang”

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.37. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	95	100	105,26	Baik

indikator indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Makassar tahun 2020 **teklah mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kurang disebabkan pada 63 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan hanya terdapat 63 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam bentuk corrective action preventive action (CAPA).
- Memasuki tahun kedua periode Renstra 2020-2024 sehingga telah tersedia baseline data untuk menentukan target yang mampu dicapai BBPOM di Makassar, perlu dilakukan review terhadap target pada tahun selanjutnya
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan

anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran disebabkan oleh lesunya perekonomian selama masa pandemi covid-19.

- Perlu strategi khusus dalam menetapkan jenis dokumen yang dihitung sebagai tindak lanjut ataupun rekomendasi yang diberikan seperti surat perintah pengawasan dari Badan POM berupa pengawasan sarana dari pusat atau tindak lanjut yang disampaikan oleh UPT Badan POM.
- Memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, UPT Badan POM dan Lintas sector untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan kategori cukup antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
2. Selama triwulan I Tahun 2021 dilakukan inspeksi rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 63 sarana dan pengawasan terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan di BBPOM Makassar dengan keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 58, Tindak lanjut = 58, capaian 100 %
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 4, Tindak lanjut = 4, capaian 100 %
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 0, Tindak lanjut = 0, capaian 0 %
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 1, Tindak lanjut = 1, capaian 100 %

Dimana capaian terendah adalah pada jenis rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 0 %.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka :

- Balai Besar POM di Makassar sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Makassar yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Balai Besar POM di Makassar tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi secara onsite dengan memperhatikan protocol Kesehatan dan analisa resiko sarana.



2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 72,67 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang Tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada triwulan I tahun 2021 adalah 62 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan adalah 83 dengan realisasi 72,67 % rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 60 %

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan I Tahun 2021 adalah 121,12 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	72,67	121,12	Tidak dapat disimpulkan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;

- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/ respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Keseluruhan jumlah Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada triwulan I Tahun 2021 adalah 83 keputusan/rekomendasi terdiri atas 236 keputusan/rekomendasi diwilayah kerja BBPOM di Makassar, dari 83 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tersebut hanya 62 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = 73, Tindak lanjut = 55
 - Obat 32 keputusan/rekomendasi, 23 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 9 keputusan/rekomendasi, 7 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 11 keputusan/rekomendasi, 9 Tindak lanjut
 - Pangan; 21 keputusan/rekomendasi, 16 Tindak lanjut
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = 2, Tindak lanjut = 1
 - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

- Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Pangan; 2 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Tabel 3.40. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020.

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	55	18,50	33,64	Sangat Kurang
Triwulan I Tahun 2021	60	72,67	121,12	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder BBPOM Makassar untuk triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Triwulan I Tahun 2021 berada pada angka 121,12 kategori “tidak dapat disimpulkan” lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2020 dengan nilai 33,64 kategori “Sangat Kurang”

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.41. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	75	72,67	96,89	Baik

indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Makassar tidak dapat disimpulkan disebabkan meningkatnya Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam bentuk corrective action preventive action (CAPA).
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian untuk sarana pemerintah (PKM, RS dan GFK/IFK) semakin mudah dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran serta adanya anggaran yang disiapkan oleh APBD.
- Untuk sarana IRTP makin minimnya pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran disebabkan oleh lesunya perekonomian selama masa pandemi covid-19

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder kategori Baik antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana maksimal.
2. Penggunaan _aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar belum optimal.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada tahun 2020
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

Capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar sebesar 99,43 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Keputusan penilaian Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I Tahun 2021 adalah 99,43 % dengan realisasi sebesar 87,50 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 88 % dengan kriteria baik.

Tabel 3.43

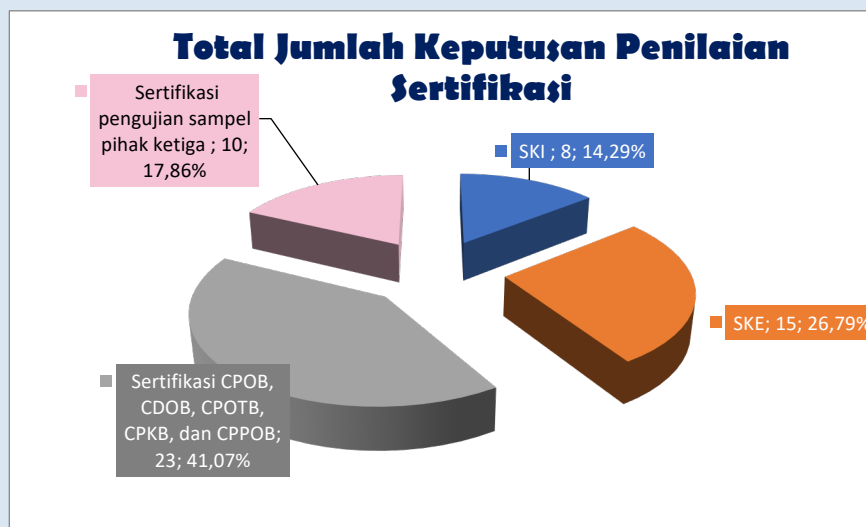
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	87,50	99,43	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan I tahun 2021 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 56 keputusan terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan I Tahun 2021 sebanyak 64 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 56 terdiri atas :

- Surat Keterangan Impor (SKI) : 8
- Surat Keterangan Ekspor (SKE) : 15
- Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB : 23
- Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga : 10



Gambar 3.19.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan I tahun 2021

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.
- hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Tabel 3.44. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020.

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	85	46,73	54,98	Kurang
Triwulan I Tahun 2021	88	87,50	99,43	Baik

Terdapat peningkatan realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 54,98 menjadi 99,43, capaiannya mengalami peningkatan 44,45 point, pada kategori baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.45. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97	87,50	90,21	Baik

indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Faktor Pendukung Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan kategori baik disebabkan :

- Capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi untuk Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK untuk lingkup BBPOM di Makassar sebanyak 29 jumlah pemohon terdapat 23 Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu atau sebanyak 79,31 % yang sesuai dengan time line
- Faktor yang juga berkontribusi terhadap nilai capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi diatas dari target yang diperjanjikan adalah Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang sesuai dengan timeline yaitu 10 dari 10 jumlah pemohon atau mencapai 100 % sesuai timeline. Hal ini juga sejalan dengan semakin meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Makassar.
- Pelaksanaan Bimtek Percepatan Penerapan Mandatori CDOB dan Pelayanan Desk CAPA
- Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha tentang kesiapan dan komitmennya dalam memenuhi persyaratan CPOB/CPOTB/CPKB/CDOB.

- Melaksanakan Desk CAPA untuk membantu sarana dalam membuat CAPA
- Petugas melakukan fasilitasi/pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sarana produksinya.

Alternatif Solusi

- Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebijakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomunikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
- Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah Peningkatan kompetensi personil Laboratorium dalam hal pengujian.
- Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sulawesi Selatan
Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi
- Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi. Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana distribusi terutama sarana distribusi obat terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana distribusi
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Pemeriksaan terkait pendampingan dan inspeksi pada sarana distribusi yang tidak tertib administrasi CDOB di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Pemberian layanan konsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan sarana akan lebih ditingkatkan

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori Sangat Baik antara lain :

- a) Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai

- b) Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- c) Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara online)
- d) Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada tahun 2021
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritis pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritis.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.

- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT

- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.

4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B

- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major

5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis /5 major.

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah optimal Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 57,45 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan vana diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100 \%$$

Tabel 3.47

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Makassar	51	57,45	112,64	Sangat Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 adalah 112,64 % dengan realisasi sebesar 57,45 % sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 51 % dengan kriteria Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 27 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 47 sarana.

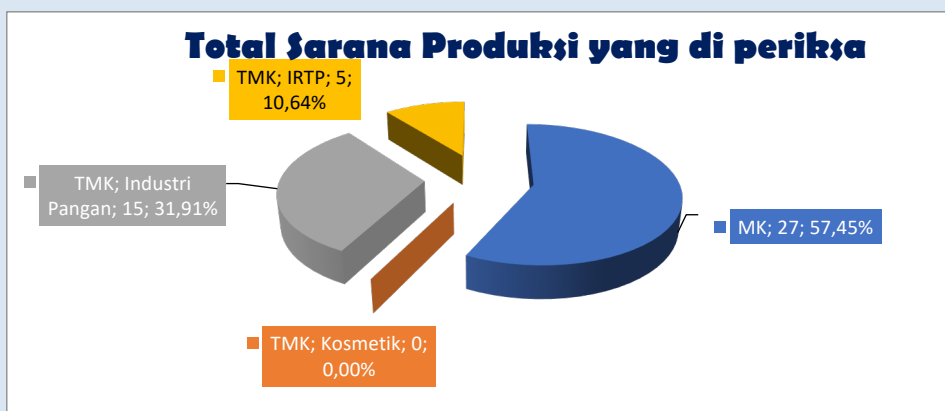
Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
 - a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
 - b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
 - a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
 - b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
 - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major

- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Keseluruhan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan I Tahun 2021 adalah 47 sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 47 sarana tersebut terdapat 20 Sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Industri Kosmetik : 0 Sarana
- Industri Pangan : 15 Sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 5 Sarana



Gambar 3.21
Jumlah Sarana Produksi yang diperiksa triwulan I Tahun 2021

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.48. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				
Triwulan I Tahun 2020	46	31,58	68,65	kurang
Triwulan I Tahun 2021	51	57,45	112,64	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 68,65 menjadi 112,64 capaiannya mengalami peningkatan 43,99 point, pada kategori Sangat Baik. yang berarti bahwa BBPOM di Makassar di telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024**

Tabel 3.49. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	67	57,45	85,74	Cukup

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis Penyebab Capaian kinerja dan alternatif solusi

Analisis Penyebab Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori sangat Baik disebabkan 31 sarana industri pangan olahan sejumlah 16 sarana yang memenuhi ketentuan dan sisanya sebanyak 15 sarana produksi pangan olahan tidak dapat memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan CPPOB (untuk Produsen pangan olahan). Penyebab sarana produksi pangan olahan tidak dapat memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan CPPOB antara lain :

- Pelaku usaha sarana produksi pangan olahan tidak konsisten dalam menerapkan CPPOB
- Tidak semua karyawan yang bekerja di sarana produksi memahami CPPOB

Alternatif Solusi

- Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi
- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi terkait pendampingan pada sarana Industri pangan dan IRTP tentang pemenuhan standar minimal hygiene sanitasi pada sarana produksi industri pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha sarana produksi IRTP yang berada di wilayah kerjanya

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Baik antara lain :

Pada triwulan I tahun 2021 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut : Mengawal ketat perencanaan pemeriksaan sarana secara daring dan luring setiap bulannya dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran, pencapaian target dan protokol kesehatan, serta kebijakan pemerintah setempat dan induk organisasi terkait pengendalian penyebaran Covid-19.

- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar.

- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol Covid-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.



2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.

Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.

Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.

Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan dicapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 78,93 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Presentase sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusi Obat Dan Makanan yang di diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I Tahun 2021 adalah 131,55 % dengan realisasi sebesar 78,93 % sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 60 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.51

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78,93	131,55	Tidak dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 251 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 318 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksaa yaitu :

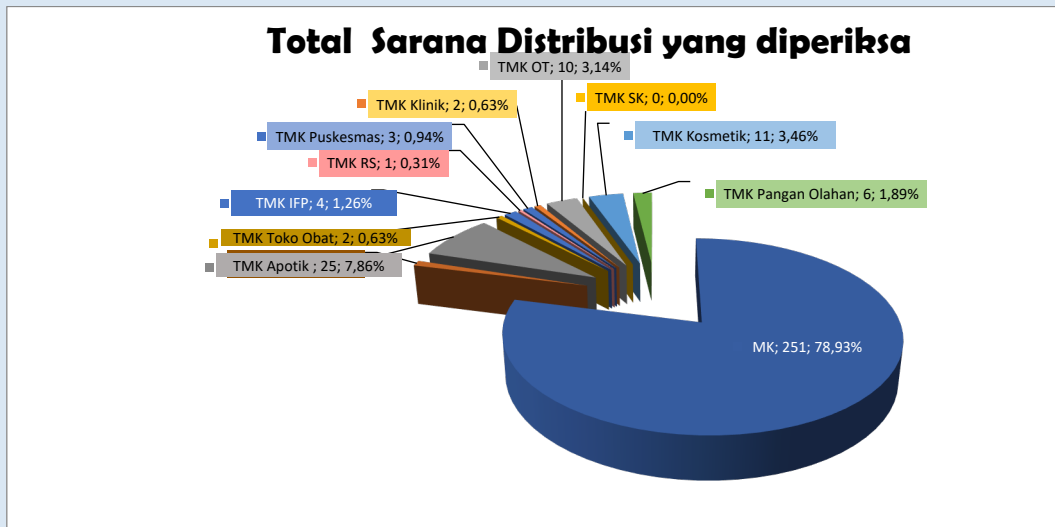
- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
- d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
- e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputy Tahun 2016) yang berlaku.
- f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
- g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021 adalah 78,93 % diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 60 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan .

Keseluruhan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan I Tahun 2021 adalah 318 sarana di wilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 318 tersebut terdapat 67 Sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 3 Sarana
- Apotik : 25 Sarana
- Toko Obat : 2 Sarana
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) : 4 Sarana
- Rumah Sakit (RS) : 1 Sarana
- Puskesmas : 3 Sarana
- Klinik : 2 Sarana
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : 10 sarana

- Fasilitas Distribusi Suplemen : 0 sarana
- Fasilitas Distribusi Kosmetik : 11 sarana
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan : 6 sarana



Gambar 3.23
Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa triwulan I Tahun 2021

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.52. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	55	61,62	112,03	Sangat Baik
Triwulan I Tahun 2021	60	78,93	131,55	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat peningkatan target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2019 berdasarkan RAPK BBPOM Makassar dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 19,52 point yang berarti bahwa BBPOM di Makassar di telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.53. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	80	78,93	98,66	Baik

indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Makassar triwulan I Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung Capaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori tidak dapat disimpulkan :

- Pada triwulan I Tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Toko Obat). Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 318 sarana (78,93 %) memenuhi ketentuan dan 67 sarana (21,07 %) tidak memenuhi ketentuan. Sarana

yang memiliki persentase memenuhi ketentuan dibawah target 60 % adalah apotek (59,02 %) dan Toko Obat (0 %) . Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat.

- Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Makassar juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 318 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 251 sarana (78,93 %) memenuhi ketentuan dan 67 sarana (21,07 %) tidak memenuhi ketentuan. Keseluruhan sarana memiliki persentase memenuhi ketentuan diatas target 60 % adalah distribusi PBF (70 %), Instalasi Sediaan Farmasi (71,43), Rumah sakit (94,44), Puskesmas (94,74), klinik (77,78), distribusi obat tradisional (76,74 %), distribusi Suplemen Kesehatan (100 %) distribusi kosmetik (77,08%), distribusi pangan olahan (87,50%). Tingginya angka kepatuhan ini disebabkan sudah adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga minimnya ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran. Selama triwulan I tahun 2021 berdasarkan laporan BBPOM Makassar telah ditemukan produk obat tradisional dan suplemen Kesehatan TIE/ kedaluwarsa sebanyak 330 item (64.944 pcs) dengan nominal Rp. 844.510.459,-. Produk tersebut diamankan oleh petugas Balai

Alternatif Solusi

1. Dikarenakan terjadinya pandemic Covid 19, pada tahun 2020 hingga triwulan I Tahun 2021 terjadi penurunan target sarana distribusi obat dan makanan sebesar 12,11 % dari target awal 1.478 sarana menjadi 1.299 sarana. Penurunan target ini juga menyebabkan terjadinya penyesuaian cara pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*) terjadinya penularan covid 19 (rumah sakit, puskesmas, klinik), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online inspection*). Pada awal terjadinya pandemic (Maret-April), pemeriksaan sarana dilakukan secara *online inspection* saja dan menyebabkan penurunan capaian sarana. Oleh karena itu mulai bulan Mei-Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara onsite ke sarana yang memiliki tingkat penularan covid 19 *low-medium risk*. Pemeriksaan sarana secara onsite memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung ke sarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh

ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Tidak dapat disimpulkan antara lain :

Penurunan target ini juga menyebabkan terjadinya penyesuaian cara pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*) terjadinya penularan covid 19 (rumah sakit, puskesmas, klinik), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online inspection*). Pada awal terjadinya pandemic (Maret-April), pemeriksaan sarana dilakukan secara *online inspection* saja dan menyebabkan penurunan capaian sarana. Oleh karena itu mulai bulan Mei-Desember 2020 hingga triwulan I Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara onsite ke sarana yang memiliki tingkat penularan covid 19 *low-medium risk*. Pemeriksaan sarana secara onsite memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung ke sarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian pemeriksaan Sarana distribusi, maka mulai bulan Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan juga secara onsite (pemeriksaan langsung) ke sarana distribusi obat dan makanan dalam jumlah yang lebih banyak daripada triwulan sebelumnya
- Balai Besar POM di Makassar melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisa risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

- Balai Besar POM di Makassar pada triwulan I tahun 2021 telah diundang menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para pelaku usaha mengetahui bagaimana cara mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
- Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, BBPOM di Makassar juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk obat dan makanan yang aman. Diharapkan melalui KIE masyarakat dapat memilih obat dan makanan yang aman dan dapat memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE (Tanpa Ijin Edar).
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.
-



6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Aspek Pengukuran

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 84,5 .

Tabel 3.55

Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

- Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima



Sasaran 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

3 Jumlah desa pangan aman

2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Target 86,87 Realisasi - Capaian 0 %

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Target - Realisasi - Capaian -

Jumlah desa pangan aman

Target - Realisasi - Capaian -

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Target - Realisasi - Capaian -

Pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 4 indikator antara lain :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik
- 2) KIE langsung ke masyarakat dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *faceto face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar , menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Pada tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Target Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 3.59

Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-	-

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Makassar dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 32 orang responden yang telah mengikuti/menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai Media.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.



2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS
Advokasi PJAS bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pemetaan Kantin Sekolah.
Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi.
Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.
3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah
Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang

berperan sebagai *agent of change* implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya
5. Audit Surveilans PBKPKS.

Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilans PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilans dan Pengawasan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilans dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Pada Tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan



3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain .

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman.

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Gap Aessment merupakan penilaian awal terhadap pengetahuan kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan dan kemampuannya dalam melaksanakan praktek keamanan pangan.

Gap asesment dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat.

Dalam rangka gap asesment Gerakan Keamanan Pangan Desa, Tim GKPD BBPOM di Makassar bersama fasilitator lapangan dan 6 enumerator melaksanakan survei terhadap kader dan komunitas desa yang berlokasi di 4 desa yang akan diintervensi program gerakan keamanan pangan desa. Responden yang diambil datanya merupakan

calon kader dan calon komunitas desa/usaha pangan desa yang akan mengikuti bimtek dan fasilitasi keamanan pangan. Hasil *gap assessment* dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan)

Setelah diperoleh data *baseline* pengetahuan komunitas desa yang akan diintervensi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan). Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan.

Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan yang dilatih di bidang keamanan pangan. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terdapat peningkatan pengetahuan kader yang dilatih

4. Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan dilingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan Bimtek dimulai dengan koordinasi fasilitator lapangan ke masing-masing desa yang akan diintervensi. Bimtek keamanan pangan dilakukan terhadap komunitas masyarakat yang terlebih dahulu telah diambil datanya pada kegiatan *gap assessment*. Komunitas masing-masing terdiri dari 10 orang. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Berdasarkan data nilai *pre-test* dan *post-test* peserta Bimtekn komunitas desa dan usaha pangan desa, dapat dilihat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan komunitas desa dan usaha pangan desa setelah mengikuti Bimtek ini.

5. Fasilitasi keamanan pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas BBPOM di Makassar bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan *rapid test kit* dengan parameter pengujian *Methanyl yellow*, *Rhodamine B*, *Boraks* dan *Formalin*. Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya.

Bagi desa yang menerapkan keamanan pangan secara mandiri, Badan POM memberikan apresiasi dalam Desa Pangan Aman *Award* yang diumumkan pada puncak perayaan ulang tahun Badan POM RI setiap tahunnya. Penilaian dilaksanakan setelah intervensi GKPD. Untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan GKPD di Kabupaten yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya, dilaksanakan pengambilan data dalam rangka Monev dilaksanakan secara langsung terhadap seluruh kader keamanan pangan desa dan komunitas desa yang diintervensi di setiap desa/kelurahan. Kader dan komunitas desa (masyarakat desa maupun usaha pangan desa) yang telah diintervensi diambil data mengenai pengetahuan, persepsi dan perilaku tentang penerapan prinsip keamanan pangan selama menangani pangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dijadikan acuan dalam melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program GKPD tahun berikutnya.

Selain Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pula kegiatan. Pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi dalam rangka pembentukan Desa Pangan Pratama agar dapat dikembangkan menjadi Desa Pangan Madya dan selanjutnya menjadi Desa Pangan Mandiri. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Makassar agar desa menjalankan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*Dihitung dari Jumlah desa yang :
Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C*

Pada tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar . Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.



4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.).

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I, II dan III tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I, II dan III tahun 2021.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya adalah :

1. Survei Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
2. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang

2. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas pasar.

3. Bimtek dan Fasilitasi Pasar aman dari bahan berbahaya kepada petugas pasar.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

4. Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

Tujuannya adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

5. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran spot iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan berbahaya dengan menggunakan lab keliling, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai Besar/Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar.

Petugas Balai Besar/Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti mobil laboratorium keliling, media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai Besar/Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F
riteria Pasar Aman meliputi :*

- 1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya*
- 2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta*
- 3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya*



Sasaran 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yang optimal di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 2 Indikator sebagai berikut

1 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada sasaran strategis keenam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan dua indikator tersebut semua indikator tersebut mencapai target yang diperjanjikan untuk triwulan I Tahun 2021.



1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 15 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar}}{2} = \frac{A + B}{2}$$

$A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I Tahun 2021 adalah 112,96 % dengan realisasi sebesar 95,21 % Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 3.75

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	11,50	76,67	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 261 sampel dan Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 165 terhadap Jumlah target sampel Obat selama tahun 2020 sebesar 1.803 Sampel Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar} / \text{jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.76

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020

Komoditi	diperiksa	diuji
Obat	88	64
Obat Tradisional	95	19
Suplemen Kesehatan	20	0
Kosmetik	105	62
Total	308	145

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.77. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
Triwulan I Tahun 2020	15	18,91	126,06	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan I Tahun 2021	15	11,50	76,67	Cukup

Terdapat peningkatan realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 126,06 menjadi 76,67 capaiannya mengalami penurunan 49,39 point, pada kategori cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.78 Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	90	11,50	-	-

indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori sangat baik antara lain :

- Adanya penurunan target pemenuhan parameter standar sampai 20%, sejak Tahun 2020 sehingga data target tahun 2020 menjadi baseline jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji ditahun 2021 penurunan target dilakukan dalam rangka mengantisipasi metode sampling acak yang akan diterapkan di semua komoditi pada tahun 2021. Di masa pandemi covid-19 ini BBPOM Makassar tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan time line pengujian serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia
- Kompetensi analis dalam melakukan parameter uji sesuai yang ditetapkan dalam pedoman sampling juga merupakan penyebab keberhasilan pencapaian target

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemi, seluruh kegiatan bimtek internal yang direncanakan pada tahun 2021 oleh BBPOM di Makassar ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring maupun luring baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain seperti Universitas dan Provider Pelatihan. Tidak adanya Bimtek internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.
- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2020 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017
- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut : Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan capaian yang cukup pada triwulan I Tahun 2021, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2022 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru. Untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.



2. Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 13,49 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar}}{\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar}} = \frac{A + B}{2}$$

$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$
 $B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi. Triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I Tahun 2021 adalah 134,90 % dengan realisasi sebesar 13,49 % Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 3.80

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard triwulan I Tahun 2021.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	13,49	134,90	Tidak Dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 143 sampel dan Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 102 terhadap Jumlah target sampel Makanan selama Tahun 2021 sebesar 1267 Sampel Makanan mencakup (segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar} / \text{jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

Makanan yang dimaksud mencakup Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Jumlah sampel Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.81

Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I Tahun 2021

Komoditi	diperiksa	diuji
Makanan	143	102
Total	143	102

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.82. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
Triwulan I Tahun 2020	10	11,17	111,71	Sangat Baik
Triwulan I Tahun 2021	10	13,49	134,90	Tidak Dapat disimpulkan

Terdapat peningkatan **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar** di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 11,71 menjadi 13,49, capaiannya mengalami peningkatan 2,32 point, pada kategori Tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.83. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	85	92,57	-	-

indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori sangat baik antara lain :

- Adanya penurunan target pemenuhan parameter standar sampai 20%, penurunan target dilakukan dalam rangka mengantisipasi metode sampling acak yang akan diterapkan di semua komoditi pada tahun 2020 menjadi baseline jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji ditahun 2021 penurunan target dilakukan dalam rangka mengantisipasi metode sampling acak yang akan diterapkan di semua komoditi pada tahun 2021. Di masa pandemi covid-19 ini BBPOM Makassar tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

time line pengujian serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia
- Kompetensi analis dalam melakukan parameter uji sesuai yang ditetapkan dalam pedoman sampling juga merupakan penyebab keberhasilan pencapaian target
- Sejak awal triwulan I Tahun 2020 sampai dengan saat ini triwulan I Tahun 2021 kegiatan sampling dan pengujian masih terhambat dengan adanya pandemi Covid- 19. Dengan kondisi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir terdapat protokol yang harus di patuhi seperti pembatasan jumlah staf yang hadir perhari. Hal ini akan mempengaruhi kinerja BBPOM di Makassar. Tugas tambahan laboratorium untuk menguji sampel covid-19 sedikit banyak juga berpengaruh terhadap penyelesaian sampel.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian makanan meningkat.

g. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemi, seluruh kegiatan bimtek internal yang direncanakan pada tahun 2021 oleh BBPOM di Makassar ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring maupun luring baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain. Tidak adanya Bimtek internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.

- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2020 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017
- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut : Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada triwulan I tahun 2021, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2022 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru. Untuk tahun 2021 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.



Sasaran 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar



1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya



Tools

Dihitung berdasarkan nilai tingkat keberhasilan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Makanan dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Makanan dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum tercapainya indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan dengan capaian 23,33 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan triwulan I Tahun 2021 adalah 146,33 % dengan realisasi sebesar 98,04 % perkara yang diselesaikan di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 67 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.85

Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan	33	23,33	70,70	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara pada tabel berikut :

Tabel 3.86

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2021

UPT	Tahapan	s.d TW I (Jan - Maret)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	12	3	2	1,00		0,15	15,00%	50,00%	46,67%	23,33%
		Tahap I			0	0,50	0,43	0,4	26,00%			
		P21			0	0,00	0,43	0,3	9,00%			
		Tahap II			0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	12	3	4	3						
	Kota Palopo	SPDP	1	0	1	1,00		0,15	15,00%	15,00%	100,00%	15,00%
		Tahap I			0	0,00	0,00	0,4	0,00%			
		P21			0	0,00	0,00	0,3	0,00%			
		Tahap II			0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	1	0	1	0						
	-	SPDP		0		0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
		Tahap I				0	0	0,4	0%			
		P21				0	0	0,3	0%			
		Tahap II				0	0	0,15	0%			
		Total	0	0	0	0						

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Tabel 3.87. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan					
Triwulan I Tahun 2020	33	46,67	141,41	Tidak dapat disimpulkan	23,33
Triwulan I Tahun 2021	33	23,33	70,70	Cukup	23,33

Terdapat penurunan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 141,41 menjadi 70,70 capaiannya mengalami peningkatan 70,71 point, pada kategori baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.88. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	90	23,33	108,93	Baik

indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung ketercapaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor pendukung :

- koordinasi lintas sektor, melalui: Penandatanganan perjanjian kerjasama/MoU antara Balai Besar POM di Makassar dengan lintas sektor terkait (Bea cukai, Kepolisian dan Kejaksaan)
- Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara.
- Hubungan kerjasama antara penyidik Balai Besar POM dengan jaksa penuntut umum sehingga perkara dapat diselesaikan sampai tahap 2.
- Adanya UU Cipta Kerja yang mengubah unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pada UU Kesehatan dan UU Pangan yang dulunya Sediaan farmasi dan Pangan harus memiliki izin edar dan dengan adanya UU Cipta Kerja berubah harus memiliki Perizinan Berusaha
- SKEP PPNS belum memiliki kewenangan terhadap UU Cipta Kerja
- Informasi pengiriman Paket obat dari Direktorat Intelejen Badan POM
- yang segera ditindaklanjuti oleh PPNS BBPOM di Makassar, sehingga menjadi berkas perkara.

- Pihak Expedisi yang dipakai oleh pengirim paket sangat kooperatif dengan BBPOM di Makassar, sehingga sangat membantu tertangkapnya penerima paket obat.
- Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
- Sebagian besar Tersangka kooperatif sehingga tahap II dapat dilaksanakan dengan baik.

Alternatif Solusi :

- Koordinasi yang secara kontinu dan berkelanjutan dengan lintas sektor terkait, utamanya dengan kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan kejaksaan
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Penindakan
- Pada UU No. 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, PPNS tidak mempunyai kewenangan penggeledahan, sehingga BBPOM Makassar harus bekerja sama dengan korwas PPNS Polda Sulawesi-Selatan untuk melakukan penggeledahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pengembangan perkara tidak maksimal.

d. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

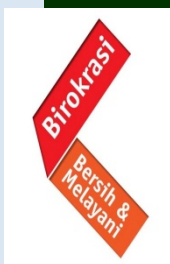
- Meningkatkan komunikasi dengan kelompok substansi Infokom dan kelompok substansi Pemeriksaan (pihak internal) BBPOM di Makassar terkait informasi awal adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- Memperdalam investigasi sehingga mendapatkan data dan fakta lapangan yang memperkuat dan menunjang dalam proses penindakan, penyidikan dan pemberkasan.
- Melakukan pengawasan daring / patroli siber untuk mengawasi dan menindaklanjuti penjualan obat dan makanan secara online yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya.
- Meningkatkan kompetensi PPNS BBPOM di Makassar.
- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Criminal Justice System sehingga upaya pemberantasan kejahatan obat dan makanan dapat tertangani dengan lebih baik.
- Menjalin hubungan yang kontinyu dan berkelanjutan dengan informan yang berperan dalam menginformasikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan.

- Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan proses pemberkasan perkara.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan semakin baik.
2. Koordinasi dengan pihak kejaksaan yang semakin baik, sehingga banyak perkara yang menjadi P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) tanpa melalui P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) dan perkara yang carry over juga langsung P21 dan bisa dilanjutkan ke tahap II.
3. Meningkatkan dan memelihara hubungan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak yang berperan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan, antara lain dengan pihak Asperindo (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia), yaitu dengan perusahaan jasa ekspedisi.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor pemerintah terkait dalam hal operasi bersama terkait penertiban Obat dan makanan ilegal yang selama ini sudah terjalin antara lain dengan adanya Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, yang anggotanya dari berbagai lintas sektor antara lain Kejaksaan Tinggi Makassar, BNNP Makassar , Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan, IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas dan Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.



Sasaran 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal





1. Indeks RB BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Akuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

Tabel 3.90

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 3.91

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Tabel 3.92

Target Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target triwulan I 2020	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pada triwulan I Tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB BBPOM di Makassar .

Target Indeks Reformasi dan Birokrasi pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 89 dimana penilaian indeks RB yang dilakukan oleh Inspektorat Utama tahun 2020 sebesar 50,45 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori kurang,. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2021 dapat tercapai

2. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Komponen

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Capaian Kinerja

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM tahun n-1.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
 - Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
 - b. Kualitas evaluasi (5%);
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Tabel 3.98

Target Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat triwulan I Pada tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB BBPOM di Makassar .

Target indikator Nilai AKIP pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 85 dimana penilaian Nilai AKIP BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh Inspektorat Utama tahun 2020 sebesar 77,27 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori kurang,. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai.

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

Pada tahun 2019, BBPOM di Makassar mendapatkan nilai AKIP BB, sehingga perlu beberapa upaya konkrit untuk mencapai target nilai A. Berdasarkan rekomendasi dari APIP terhadap implementasi SAKIP BBPOM di Makassar pada tahun 2019 maka telah dilakukan perbaikan di tahun 2020 berupa: penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Renja, menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan draft Renstra 2020-2024, pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan yang berdasarkan Balance Scorecard dan pengukuran kinerja cascading dari pejabat eselon 2 di BBPOM di Makassar hingga pejabat eselon 3 dan 4, mengintegrasikan e-performance dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu, revisi SOP mikro monitoring dan evaluasi, penyusunan Perjanjian Kinerja individu bagi seluruh pegawai berdasarkan cascading kinerja, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Makassar telah dilakukan pada bulan Juli 2020 pada aplikasi simolekdesi. Renstra 2020-2024 telah selesai disusun pada triwulan II tahun 2020, didalamnya telah memuat beberapa perubahan kebijakan dan perubahan pengukuran indikator hasil evaluasi kinerja tahun 2019 yang diharapkan

dapat mengukur kinerja secara lebih tepat. Penyesuaian dokumen PK, RAPK, RKT, dan IKU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 juga telah diselesaikan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar adalah:

Berdasarkan evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP atas implementasi SAKIP 2019. Sedangkan hasil rekomendasi APIP atas implelementasi SAKIP BBPOM di Makassar tahun 2020 akan diterapkan di tahun 2021 sebagai upaya perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai sesuai target Renstra dan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat, BBPOM di Makassar akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan

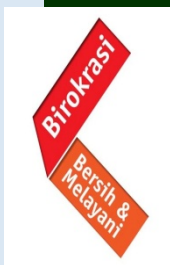
Mencantumkan sub kegiatan/ komponen secara rinci pada dokumen RENSTRA 2020-2024 yang akan di review dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/ kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
- b. Pengukuran
 - i. Menyelaraskan petapkan target kinerja atas perjanjian kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu, serta menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai;
 - ii. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit sebagai dasar pemberian reward and punishment;
 - iii. Membuat SOP dan mekanisme pengumpulan data kinerja secara transparan dan akuntabel
- c. Pelaporan
 - i. Menyajikan perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dengan target IKU Badan POM, realisasi atau capaian tahun berjalan dengan capaian satker lain yang memiliki indikator sejenis;
 - ii. Analisis efisiensi pengukuran kinerja kegiatan per sasaran;
 - iii. Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
- d. Evaluasi Internal
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

- ii. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
- e. Capaian Kinerja
 - i. Melakukan pengawalan terhadap pencapaian target indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan;
 - ii. Membuat sistem informasi kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

Sebagai upaya pencapaian indikator Nilai AKIP di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat yaitu Melakukan perbaikan, menyampaikan dan mensosialisasikan kepada seluruh komponen penanggung jawab bidang masing-masing atas saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah di BBPOM Makassar sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah serta rapat evaluasi nasional.



Sasaran 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal





1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Akuan

**Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2018
Tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei dian survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Tabel 3.102

Target Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

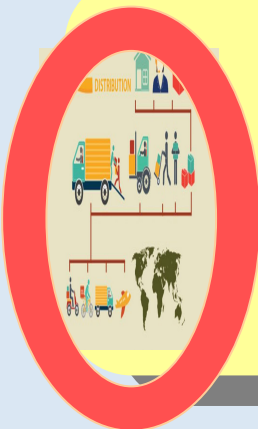
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	73,49	97,99	Baik

Target indicator Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 77. Penilaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh Biro Umum dan SDM tahun 2020 sebesar 73,49 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori Baik. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai.



Sasaran 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Akuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75: Sangat Kurang

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

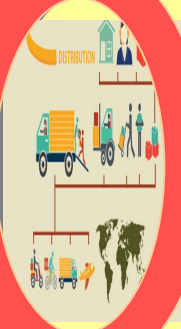
1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Tabel 3.106

Target Kinerja Indikator Persentase Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 79. Penilaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BPOM di Makassar yang dilakukan oleh P3OMN tahun 2020 sebesar 70,60 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori cukup. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai.



Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Akuan

**Perhitungan Diperoleh dari Nilai
Asesmen
Pusat Data dan Informasi Nasional**

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan makanan dan minuman, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan makanan dan minuman oleh pimpinan

- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC

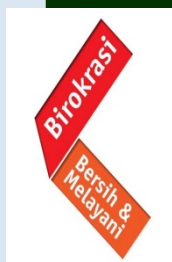
Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Tabel 3.111

Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,32	87,42	Cukup

Target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan I Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 2. Penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh Pusdatin tahun 2020 sebesar 1,32 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori cukup. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai pada triwulan kedua.



Sasaran 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel





1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Akuan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai (EKA) bobot 60 % dengan Nilai (IKPA) bobot 40 %

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III DIPA
 - c. Pengelolaan UP
 - d. Rekon LPJ Bendahara
 - e. Data Kontrak
 - f. Penyelesaian Tagihan
 - g. Penyerapan Anggaran

- h. Retur SP2D
- i. Perencanaan Kas (Renkas)
- j. Pengembalian/Kesalahan SPM
- k. DispensasiPenyampaian SPM
- l. Pagu Minus
- m. Konfirmasi Capaian Output

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 adalah 100,08 % dengan realisasi sebesar 93,07 %, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 93 dengan kriteria Baik.

Tabel 3.115

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	30	36,96	123,20	Tidak dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 %

Tabel 3.116

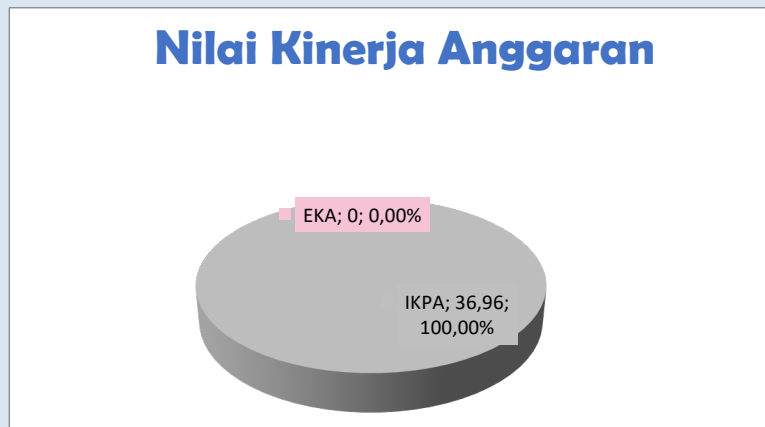
Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021

Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	Bobot	Hasil
EKA	0	60%	0
IKPA	92,41	40%	36,96
Total		100%	36,96

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 sebesar 36,96 terdiri atas :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % = 0

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 % = 36,97



Gambar 3.36

Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan I Tahun 2021

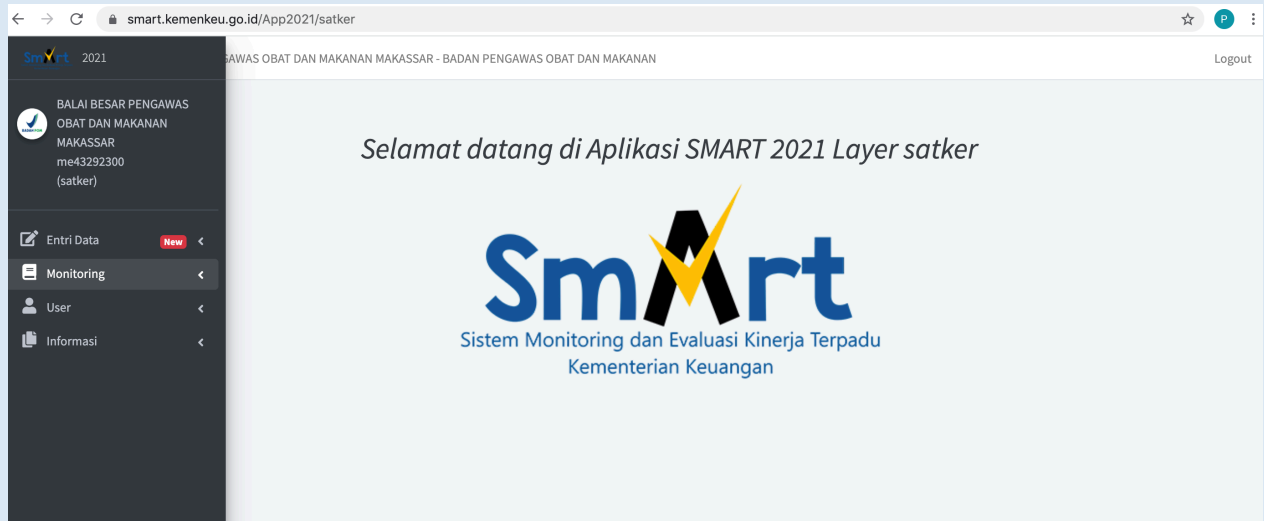
a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian *output*.

Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L saat ini serta sebagai bentuk relaksasi kebijakan penilaian IKPA belanja K/L triwulan I Tahun 2021 dalam rangka mendukung kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk percepatan penanganan Covid-19, Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan I Tahun 2021 pada Aplikasi OM-SPAN sebesar 92,41

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.



Gambar 3.37

Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA triwulan I Tahun 2021

Dari gambar di atas, dapat dilihat Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2021 belum ada penilaian

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Tabel 3.117. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator Nilai Kinerja Anggaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2020	30	50,33	167,77	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan I Tahun 2021	30	36,96	123,20	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat penurunan realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 167,77 menjadi 123,20 capaiannya mengalami penurunan 44,57 point, pada kategori tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.118. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	30	97	36,96	-	-

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2021 **tidak dapat dibandingkan**. Serta diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih representatif menjadi kategori Sangat Baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 sebesar 0
ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu
Realisasi anggaran = 0
Konsistensi RPD awal = 0
Konsistensi RPD akhir = 0
Capaian keluaran kegiatan = 0
Efisiensi = 0
Belum ada nilai pada dashboard aplikasi Monev DJA dari Kementerian Keuangan
- Penyerapan anggaran BBPOM di Makassar pada triwulan I tahun 2021 sebesar Rp 41,272,184,951,- (89,74%) terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 6.011.702.232,- dan masih dibawah dari target minimal penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL pada triwulan I Tahun 2021 sebesar 15 %.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
- Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan-Prioritas Nasional serta Penanganan pandemi akibat Covid-19
- Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
- Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) terhadap belanja penanganan pandemi Covid-19 yang tidak menggunakan akun-akun khusus Covid-19;
- Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;
- Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode tahun ketiga Renstra 2020-2024
- Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
- Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Makassar II dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.
- Mengikuti Sosialisasi terkait IKPA dan EKA oleh DJPB dan KPPN
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2021 oleh DJPB

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya nilai kinerja anggaran pada triwulan 1 disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran, maka telah dilakukan percepatan penyerapan anggaran pada triwulan 2, 3 dan 4, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan oleh Kepala BBPOM di Makassar dan di masing-masing bidang untuk memastikan semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai, selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, diantaranya revisi untuk penambahan pelaksanaan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat.
- Telah dilakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Realisasi capaian per output kegiatan BBPOM di Makassar bisa tercapai sesuai dengan target yang direncanakan .



2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE)

Akuan

**Perhitungan Diperoleh dari Nilai
Asesmen
Pusat Data dan Informasi Nasional**

- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

- c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

1. Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1

Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan I Tahun 2021

Capaian Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar triwulan I Tahun 2021 adalah 107,95 % dengan realisasi sebesar 95, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 88 dengan kriteria sangat baik.

Tabel 3.120

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	95	107,95	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari range nilai dari perbandingan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi

Tabel 3.121.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	% Capaian	IE	SE	TE	Range
Input	77,42	1,27	1	0,27	0,2- 0,4: 95 % → Efisien
Output	98,33				

Nilai tingkat efisiensi kegiatan BBPOM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021 sebesar 100% (Efisien).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.122. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran				
Triwulan I Tahun 2020	88	78	88,64	Cukuo
Triwulan I Tahun 2021	88	95	107,95	Baik

Terdapat peningkatan realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2020 dari nilai 88,64 menjadi 113,64 capaiannya mengalami peningkatan 25 point, pada kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.123. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan I 2021	Target 2024	Realisasi triwulan I 2021	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	88	95	107,95	Sangat Baik

indikator Indeks Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 **mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Sangat Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tetap dipertahankan sebagai kategori Sangat Baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja realisasi anggaran disebabkan oleh :

Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Makassar sudah tercapai dan melebihi target. Hal ini disebabkan karena dari 28 indikator 10 indikator yang memiliki realisasi dibawah 100%, sisanya 18 indikator memiliki realisasi diatas 100%. Sedangkan realisasi anggaran dari 28 indikator 15 diantaranya diatas 90% dan dibawah 100% sedangkan 13 indikator sisanya berada dibawah 90 %, sehingga menghasilkan efisiensi karena dengan anggaran yang terbatas bisa menghasilkan output/outcome yang melebihi target. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 28 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran. Beberapa indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target dipantau secara intensif sejak triwulan 1 namun perlu pengawalan terhadap. Indikator yang capainya cukup yaitu indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; Indeks RB UPT; Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan

data dan informasi UPT yang optimal agar ke empat indicator ini kedepan capaiannya termasuk dalam kategori Baik .

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
4. Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19;
5. Melakukan revisi penghematan anggaran terkait pandemi Covid-19;
6. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja pada rencana aksi, yang diwujudkan dalam dokumen Plan of Action;
7. Mengoptimalkan hasil pelaporan kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi untuk periode selanjutnya;
8. Memperkuat monitoring periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja;

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
- Pelaksanaan kegiatan/output dilaksanakan sesuai dengan target dan segera melakukan proses keuangan sehingga deviasi antara capaian output dan capaian anggaran tidak terlalu jauh;
- Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan efisiensi penggunaan anggaran BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka rencana aksi yang telah dilakukan hingga tahun 2020 adalah melakukan pemantauan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target agar efisiensi penggunaan anggaran dapat efisien.
2. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.
3. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2020 oleh DJPB
4. Melakukan Monitoring Evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
5. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja pada rencana aksi, yang diwujudkan dalam dokumen Plan of Action;

1) Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2021, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 23 Nopember 2019 sebesar Rp. **50.528.112.000,-**. Realisasi anggaran triwulan I Tahun 2021 adalah Rp. 6.011.702.232,- atau 11,90 %,.. Jumlah Pagu Anggaran per jenis belanja beserta realisasinya pada triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.125 di bawah ini

Tabel 3.125

Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021

No	Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	BALAI BESAR PENGAWAS MAKANAN DAN MAKANAN MAKASSAR	PAGU	19.511.605.000	22.680.655.000	8.335.852.000	50.528.112.000
		REALISASI	3.487.078.921	1.802.212.801	0	5.289.291.722
		PERSENTASE	(17,87 %)	(7,95 %)	(0 %)	(10,47 %)
		SISA	16.024.526.079	20.878.442.299	8.335.852.000	50.528.112.000

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan

anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

Tabel 3.126

Data Sasaran Strategis dan Realisasi Penyerapan Anggaran triwulan I Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target TW I	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	84,21	100,73	381.100.800	121.787.011	31,96
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	90,00	112,50	176.469.750	30.243.701	17,14
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	100,00	119,62	95.275.200	30.446.753	31,96
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	89,16	111,45	58.823.250	10.081.234	17,14
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	139.350.000	0	0,00

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	229.649.000	0	0,00
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	105.166.000	33.505.000	31,86
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	577.333.000	13.362.000	2,31
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36	189.543.200	16.310.028	8,60
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	74,69	124,48	81.232.800	6.990.012	8,60
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	87,50	99,43	228.240.000	42.179.000	18,48

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2020

		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	57,45	112,65	365.455.000	33.310.000	9,11
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78,93	131,55	1.708.359.000	153.932.254	9,01
		14	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	99.720.000	4.250.000	4,26
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	-	-	3.396.344.000	0	0,00
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	798.340.000	0	0,00
		17	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	913.058.000	0	0,00
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	4,00	-	503.990.000	13.550.000	2,69
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	12,49	83,27	461.440.000	0	0,00
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	12,23	122,30	529.370.000	11.090.640	2,10
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	35,00	106,06	1.336.127.000	51.140.000	3,83

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2020

8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	19.782.351.000	4.183.837.411	21,15
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	342.215.000	0	0,00
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	383.907.000	0	0,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	8.851.737.000	164.383.350	1,86
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2	-	-	380.291.000	23.674.000	6,23
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	30	36,96	123,20	8.045.029.000	1.019.024.220	12,67
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	95,00	107,95	368.196.000	48.605.619	13,20
							50.528.112.000	6.011.702.232	11,90

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2020

Berdasarkan table 3.51, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran yang paling besar adalah Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Makassar dengan persentase capaian yang sama yaitu 31,96. Sedangkan persentase penyerapan anggaran terendah adalah untuk sasaran kegiatan kedua, yaitu: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dan untuk sasaran kegiatan kesembilan, yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal dengan capaian 0 %

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat Efisiensi Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 127. Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan BBPOM Makassar triwulan I Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Output		Rata-rata % Capaian		IE	TE	Kategori	
			Input	Output				
1.	ADD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	6,27	25,00	3,99	2,99	Tidak Efisien	75 %
2.	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM (Laporan)	0,00	11,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
3.	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM (Keputusan)	9,21	5,00	0,54	-0,46	Tidak Efisien	75 %
4.	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (Orang)	0,43	14,69	33,96	32,96	Tidak Efisien	75 %
5.	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	8,09	25,00	3,09	2,09	Tidak Efisien	75 %
6.	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM (Layanan)	0,00	3,85	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
7.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Paket)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
8.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
9.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	003 Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %

10.	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U44 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR (Persen)	4,40	16,67	3,78	2,78	Tidak Efisien	75 %
11.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
12.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
13.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	2,69	50,00	18,60	17,60	Tidak Efisien	75 %
14.	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	3,25	3,35	1,03	0,03	Efisien	100 %
15	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM (Persen)	16,23	7,95	0,49	-0,51	Tidak Efisien	75 %
16.	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM (Persen)	56,99	27,37	0,48	-0,52	Tidak Efisien	75 %
	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	9,96	25,54	2,57	1,57	Tidak Efisien	80 %
	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	9,35	31,94	3,42	2,42	Tidak Efisien	75 %
	EAA Layanan Perkantoran (Layanan)	004 Layanan Perkantoran UPT (Layanan)	20,36	25,00	1,23	0,23	Efisien	95 %

Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan efisien yaitu Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen) dan Layanan Perkantoran UPT (Layanan). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan adalah 0,03 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (Orang) mempunyai TE tertinggi karena output sudah 14,69 % sesuai target dengan penyerapan anggaran rendah yaitu 0,43 %.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) yang dimiliki BBPOM di Makassar belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan,

pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Pada triwulan I Tahun 2021, Dari 28 dimana hanya 16 indikator yang memiliki target dan realisasi sedangkan 12 indikator lainnya target pada akhir tahun 2021, indikator yang mendukung pencapaian 11 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar, berdasarkan Tabel 5.13 terdapat 4 (empat) indikator kinerja triwulan I Tahun 2021 yang Tidak Efisien serta ada 12 indikator yang Efisien dengan Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,10 sampai 0,96. Nilai TE tertinggi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (TE = 0,96) dan Nilai TE terendah adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat (TE = 0,10). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.

Tabel 3.128

Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,30	100,73	1,10	1	EFISIEN	0,10
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	68,55	112,50	1,64	1	EFISIEN	0,64
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,30	119,62	1,31	1	EFISIEN	0,31
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,55	111,45	1,63	1	EFISIEN	0,63
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,00	-	-	1		
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-	-	1		
	7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	91,03	-	-	1		
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	15,43	-	-	1		
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57,37	112,36	1,96	1	TIDAK EFISIEN	0,96
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,37	124,48	2,17	1	EFISIEN	1,17
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	52,80	99,43	1,88	1	EFISIEN	0,88

	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,76	112,65	1,85	1	EFISIEN	0,85
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,07	131,55	2,19	1	EFISIEN	1,19
	14	Indeks Pelayanan Publik	28,41	-	-	1		
5	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	-	-	1		
	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0,00	-	-	1		
	17	Jumlah desa pangan aman	0,00	-	-	1		
	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	17,92	-	-	1		
6	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	83,27	-	1	EFISIEN	0,00
	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,97	122,30	8,76	1	EFISIEN	7,76
7	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	25,52	106,06	4,16	1	EFISIEN	3,16
8	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	141,00	-	-	1		
	23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	0,00	-	-	1		
9	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	0,00	-	-	1		
10	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	12,38	-	-	1		
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	41,50	-	-	1		
11	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	84,44	123,20	1,46	1	EFISIEN	0,46
	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,01	113,64	1,29	1	EFISIEN	0,29
Total			77,42	98,33	1,27	1	EFISIEN	0,27

Tabel 129. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

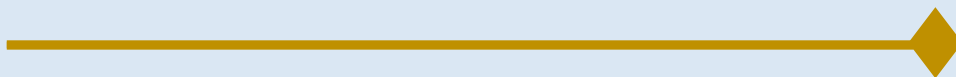
No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	111,07	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	116,09	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	102,78	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	106,06	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	115,58	Sangat Baik



Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Interim triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.



4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 belum sepenuhnya dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 11 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Interim triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Tahun 2021 evaluasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Sementara dalam laporan Interim triwulan I Tahun 2021 ini didasarkan pada target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Level II Kepala Balai Besar POM di Makassar Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 28 indikator tersebut, telah dilakukan 19 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis diantaranya ada 5 sasaran strategis untuk penilaian triwulan I Tahun 2021, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Sangat Baik” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Baik”, tidak ada sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” dan begitupun tidak ada sasaran strategis memperoleh capaian “Cukup”.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 111,07 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021;
 - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 116,09 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021;
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 102,78 % dengan kriteria “ Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas

pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada triwulan I Tahun 2021;

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 106,06 % dengan kriteria “Baik ”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada triwulan I tahun 2021;
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 115,58 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mengelola keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel pada triwulan I Tahun 2021.
 - Capaian indikator kinerja Utama sasaran strategis kedua “meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar ; sasaran strategis ketiga meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar; sasaran strategis kelima meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar; sasaran strategis kedelapan mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal; sasaran strategis kesembilan terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal serta sasaran strategis kesepuluh menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan belum ada target dan penilaian pada sasaran strategis tersebut pada triwulan I Tahun 2021
3. Pada triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Makassar melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan efisien yaitu Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen) dan Layanan Perkantoran UPT (Layanan). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan adalah 0,03 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (Orang) mempunyai TE tertinggi karena output sudah 14,69 % sesuai target dengan penyerapan anggaran rendah yaitu 0,43 %.

4.2. SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga dapat memberikan alternative perbaikan.
- Dilakukan reviu untuk menaikkan target 3 indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan, yaitu indikator ke-13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (132,64 %), indikator ke-20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (123,43 %), dan indikator-21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (146,33 %).
- Perlu direncanakan upaya dan langkah-langkah nyata di tahun 2021 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2020 serta hasil evaluasi triwulan I Tahun 2021 untuk mencapai target 10 indikator yang belum tercapai di tahun 2020 yaitu pada indikator ke-4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (99,26 %), indikator ke-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (99,40 %), indikator ke-9 keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (78,38 %), indikator ke-10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (94,38 %), indikator ke-14 Indeks Pelayanan Publik (99,15 %), indikator ke-22 Indeks RB BBPOM di Makassar (59,35 %), indikator ke-23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar (95,40 %), indikator ke-24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar (97,99 %), indikator ke-25 persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (89,59 %), dan indikator ke-26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal (87,42 %).

